

**1 PERNYATAAN STANDAR****2 AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101**

3

4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

5

6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12

13

14 PENDAHULUAN

15

16 Tujuan

17

18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan
19 pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general*
20 *purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang
21 selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan
22 baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode
23 sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah
24 lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
25 transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar
26 Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

27

28 Ruang Lingkup

29

30 2. *Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan*
31 *keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang*
32 *disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar*
33 *Akuntansi Keuangan.*

34

35 3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah
36 entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-
37 prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

38



1 4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
2 keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
3 sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk
4 tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan
5 terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya
6 seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku
7 pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

8
9 5. *Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.*

10
11
12
13
14 6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok
15 bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas
16 bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik,
17 pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan
18 standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian
19 terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan
20 keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat
21 pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan
22 keuangannya.

23
24 7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang
25 modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi,
26 memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian
27 dalam laporan keuangannya.

28 **Tujuan Laporan Keuangan**

29
30
31 8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur
32 dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas
33 syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
34 memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus
35 kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar
36 kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-
37 keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban
38 (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber



- 1 daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
- 2 mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan
- 3 informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:
- 4 (a) aset;
- 5 (b) kewajiban;
- 6 (c) dana syirkah temporer;
- 7 (d) ekuitas;
- 8 (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- 9 (f) arus kas;
- 10 (g) dana zakat; dan
- 11 (h) dana kebajikan.

12

13 9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya
14 yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu
15 pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan
16 khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas
17 dan setara kas.

18

19 **Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan**

20

21 10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas
22 penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

23

24 **Komponen Laporan Keuangan**

25

26 *11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari*
27 *komponen-komponen berikut ini:*

28 (a) *Neraca;*

29 (b) *Laporan Laba Rugi;*

30 (c) *Laporan Arus Kas;*

31 (d) *Laporan Perubahan Ekuitas;*

32 (e) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;*

33 (f) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;*

34 *dan*

35 (g) *Catatan atas Laporan Keuangan.*

36

37 *12. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuang-*
38 *an maka selain komponen laporan keuangan yang diurai-*



1 *kan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus*
2 *menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang*
3 *menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika sub-*
4 *stansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11.*
5

6 **13. Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan**
7 **keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus**
8 **untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran**
9 **Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak**
10 **terpisahkan.**

11
12 **14. Apabila entitas syariah belum melaksanakan**
13 **fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap**
14 **harus menyajikan komponen laporan keuangan huruf (e)**
15 **dan (f).**

16
17 15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan
18 keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang
19 mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas
20 syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut
21 dapat meliputi:

- 22 (a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan
23 kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana
24 entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan
25 hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan
26 memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan
27 dividennya;
28 (b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio
29 kewajiban terhadap ekuitas; dan
30 (c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam
31 neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar
32 Akuntansi Keuangan.
33
34
35
36
37
38

**1 PERTIMBANGAN MENYELURUH**

2

3 Penyajian Secara Wajar

4

5 *16. Laporan keuangan harus menyajikan secara*
6 *wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas*
7 *entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar*
8 *Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan*
9 *yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
10 *dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain*
11 *tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang*
12 *wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan*
13 *oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.*

14

15 *17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
16 *belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran,*
17 *penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau*
18 *peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai*
19 *melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi*
20 *sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang*
21 *dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan*
22 *informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan*
23 *dapat dipahami.*

24

25 18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan
26 secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga
27 tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin
28 tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal
29 pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan
30 laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas
31 syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi
32 yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara
33 wajar.

34

35 19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering meng-
36 akibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam
37 PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan
38 keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan



1 kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan
2 informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka
3 Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

4

5 **Kebijakan Akuntansi**

6

7 *20. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan*
8 *akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan*
9 *dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika*
10 *belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Ke-*
11 *uangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan*
12 *untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan*
13 *informasi:*

14 (a) *relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan*
15 *untuk pengambilan keputusan; dan*

16 (b) *dapat diandalkan, dengan pengertian:*

17 (i) *mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan*
18 *posisi keuangan entitas syariah;*

19 (ii) *menggambarkan substansi ekonomi dari suatu*
20 *kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata*
21 *bentuk hukumnya;*

22 (iii) *netral yaitu bebas dari keberpihakan;*

23 (iv) *mencerminkan kehati-hatian; dan*

24 (v) *mencakup semua hal yang material.*

25

26 21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar,
27 konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah
28 dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

29

30 22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka
31 manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan
32 kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang
33 bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan
34 pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

35 (a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal
36 yang mirip dengan masalah terkait;

37 (b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,

38



1 dana *syirkah* temporer, penghasilan dan beban yang
2 ditetapkan dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan*
3 *Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah*; dan
4 (c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain
5 dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan
6 huruf (a) dan (b) paragraf ini.

7

8 **Kelangsungan Usaha**

9

10 **23.** *Dalam penyusunan laporan keuangan, manaje-*
11 *men harus menilai (assessment) kemampuan kelangsung-*
12 *an usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun*
13 *berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali mana-*
14 *jemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau*
15 *tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut.*
16 *Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian*
17 *yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau*
18 *kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelang-*
19 *sungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan ke-*
20 *uangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan*
21 *usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan*
22 *bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam*
23 *penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa*
24 *asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat*
25 *digunakan.*

26

27 24. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbang-
28 kan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan
29 dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbang-
30 kan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan,
31 manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang
32 relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
33 dari tanggal neraca.

34

35 **Dasar Akrual**

36

37 **25.** *Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan*
38 *atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan peng-*

- 1 *hitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha.*
2 *Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan*
3 *pada pendapatan yang benar-benar terjadi (cash basis).*
4

5 **Konsistensi Penyajian**

6

7 *26. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan*
8 *keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:*

- 9 *(a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat*
10 *operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan*
11 *menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu*
12 *transaksi atau peristiwa; atau*
13 *(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan*
14 *Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi*
15 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.*

16

17 27. Akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang
18 terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan
19 menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus
20 disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubah
21 penyajian laporannya jika hanya perubahan penyajian
22 tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih
23 relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang
24 baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan
25 daya komparatifnya. Ketika melakukan perubahan penyajian,
26 entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif
27 sesuai paragraf 35 dan 36.

28

29 **Materialitas dan Agregasi**

30

31 *28. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam*
32 *laporan keuangan sedangkan yang tidak material*
33 *digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau*
34 *fungsi yang sejenis.*

35

36 29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas
37 sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau
38 fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan



1 pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau
2 Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak
3 material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis
4 dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
5 Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah
6 dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan
7 terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi
8 dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi
9 tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan
10 dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan
11 materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut
12 harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor
13 penentu. Penerapan konsep materialitas berarti pengungkapan
14 spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau
15 Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan
16 adalah tidak material.

17

18 **Saling Hapus (*Offsetting*)**

19

20 ***30. Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasil-***
21 ***an dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling***
22 ***hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi***
23 ***Standar Akuntansi Keuangan.***

24

25 31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman
26 pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah
27 dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan
28 keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali
29 mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang
30 dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan,
31 tidak termasuk kategori saling hapus.

32

33 32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan
34 transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama
35 pendapatan dan bersifat insidental. Hasil dari transaksi tersebut
36 disajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan dengan
37 beban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebut
38 menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.



- 1 Contoh:
- 2 (a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar
- 3 termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan dengan
- 4 mengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan beban
- 5 yang timbul akibat pelepasan aset tersebut;
- 6 (b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak
- 7 dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi
- 8 dengan penggantian yang diterima; dan
- 9 (c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak
- 10 terkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan
- 11 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

13 Informasi Komparatif

14

15 **33. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara**

16 **komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan**

17 **lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.**

18 **Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif**

19 **dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan**

20 **kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan**

21 **keuangan periode berjalan.**

22

23 34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan

24 pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk

25 diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang

26 sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum

27 diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih

28 dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada

29 periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh

30 manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal

31 Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan

32 pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

33

34 **35. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam**

35 **laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus**

36 **direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila**

37 **jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkap-**

38 **kan:**



- 1 (a) *sifat dari reklasifikasi;*
- 2 (b) *jumlah setiap pos atau kelompok pos yang di-*
- 3 *reklasifikasi; dan*
- 4 (c) *alasan reklasifikasi.*

5

6 **36. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak**

7 **praktis dilakukan maka harus diungkapkan:**

- 8 (a) *alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut;*
- 9 *dan*
- 10 (b) *sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah*
- 11 *tersebut direklasifikasi.*

12

13 37. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai

14 dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecen-

15 derungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi.

16 Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untuk menjaga

17 daya banding informasi komparatif dengan informasi pada

18 periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode

19 sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak

20 memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk

21 menciptakan kembali informasi tersebut.

22

23

24 STRUKTUR DAN ISI

25

26 Identifikasi Laporan Keuangan

27

28 **38. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibeda-**

29 **kan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen**

30 **publikasi yang sama.**

31

32 39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari

33 suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK

34 hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk

35 informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau

36 dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna

37 untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun

38 sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat



1 bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan
2 sesuai dengan PSAK.

3

4 **40. Setiap komponen laporan keuangan harus diiden-**
5 **tifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini**
6 **disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap**
7 **halaman laporan keuangan:**

8 (a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;

9 (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya
10 satu entitas atau beberapa entitas;

11 (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan ke-
12 uangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen
13 laporan keuangan;

14 (d) mata uang pelaporan; dan

15 (e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian
16 laporan keuangan.

17

18 41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi dengan
19 menyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap
20 halaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam
21 menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut
22 di atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudah
23 dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam
24 ribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima
25 sepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan
26 informasi yang relevan tidak hilang.

27

28 **Periode Pelaporan**

29

30 **42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara**
31 **tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan**
32 **laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang**
33 **lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun,**
34 **maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan lapor-**
35 **an keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:**

36 (a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode
37 satu tahunan; dan

38 (b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba



1 ***Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,***
2 ***Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,***
3 ***Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,***
4 ***serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat***
5 ***diperbandingkan.***
6

7 43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten
8 yang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasan
9 kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya
10 yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak
11 melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang
12 dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian
13 laporan keuangan untuk satu tahun.

14

15 **NERACA**

16

17 **Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka** 18 **Pendek dengan Jangka Panjang**

19

20 ***44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah***
21 ***dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek ter-***
22 ***pisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri***
23 ***tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan***
24 ***khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas***
25 ***sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh***
26 ***temponya.***

27

28 ***45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi***
29 ***mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan***
30 ***kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah***
31 ***12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.***
32

33 46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa
34 dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi
35 dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta
36 kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca
37 memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan
38 aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan



1 untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga
2 menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus
3 operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada
4 periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset
5 dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan
6 solvabilitas entitas syariah.

7

8 **Aset Lancar**

9

10 *47. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika*
11 *aset tersebut:*

12 *(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk*
13 *dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus*
14 *operasi normal entitas syariah; atau*

15 *(b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan*
16 *jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam*
17 *jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal*
18 *neraca; atau*

19 *(c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak*
20 *dibatasi.*

21 *Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifi-*
22 *kasikan sebagai aset tidak lancar.*

23

24 48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-rata
25 jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses
26 dan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan
27 kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang
28 dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus nor-
29 mal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidak diharap-
30 kan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari
31 tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset
32 lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direali-
33 sasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca
34 dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset
35 tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini, siklus operasi
36 diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatan atau industri
37 tertentu dimana jangka waktu yang lebih panjang jelas lebih
38 layak.

1 Kewajiban Jangka Pendek

2

3 *49. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban-*
4 *angka pendek, jika:*

5 *(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu*
6 *siklus normal operasi entitas syariah; atau*

7 *(b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan*
8 *dari tanggal Neraca.*

9 *Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai*
10 *kewajiban jangka panjang.*

11

12 50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan
13 cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban
14 jangka pendek seperti hutang dagang dan biaya pegawai serta
15 biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang
16 digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pos-
17 pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai
18 kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut
19 diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari
20 tanggal neraca.

21

22 51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk
23 dikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh
24 tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca,
25 misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain
26 utang dagang.

27

28 Informasi yang Disajikan dalam Neraca

29

30 *52. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa*
31 *yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang*
32 *diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal*
33 *mencakup pos-pos berikut:*

34 *(a) kas dan setara kas;*

35 *(b) piutang usaha dan piutang lainnya;*

36 *(c) aset keuangan;*

37 *(d) persediaan;*

38 *(e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode*

- 1 *ekuitas;*
- 2 *(f) aset tetap;*
- 3 *(g) aset tak berwujud;*
- 4 *(h) hutang usaha dan hutang lainnya;*
- 5 *(i) hutang pajak;*
- 6 *(j) dana syirkah temporer;*
- 7 *(k) hak minoritas; dan*
- 8 *(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.*
- 9 *Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca*
- 10 *apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi*
- 11 *Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan*
- 12 *untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara*
- 13 *wajar.*

14
15 53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format
16 mengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf
17 52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifat
18 maupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secara
19 terpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atas meliputi:

- 20 (a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar
- 21 Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secara terpisah
- 22 dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat material
- 23 sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian
- 24 posisi keuangan secara wajar;
- 25 (b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah
- 26 sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya guna
- 27 memberikan informasi yang diperlukan bagi pemahaman
- 28 posisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.

29
30 54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan
31 secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:

- 32 (a) sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- 33 (b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah;
- 34 (c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

35
36 55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
37 kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda.
38 Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau



1 penilaian kembali, maka penggunaan dasar pengukuran yang
2 berbeda untuk setiap aset mengindikasikan bahwa sifat dan
3 fungsi aset tersebut juga berbeda sehingga aset tersebut harus
4 disajikan secara terpisah.

5

6 **Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas**
7 **Laporan Keuangan**

8

9 *56. Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca*
10 *atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi*
11 *pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang*
12 *tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos*
13 *disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan*
14 *sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas*
15 *syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah aso-*
16 *siasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa*
17 *lainnya diungkapkan secara terpisah.*

18

19 57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neraca
20 atau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung pada
21 persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang
22 bersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54
23 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.

24

25 *58. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di*
26 *Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:*

27 *(a) untuk setiap jenis saham:*

28 *(b) jumlah saham modal dasar;*

29 *(c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;*

30 *(d) nilai nominal saham;*

31 *(e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;*

32 *(f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat*
33 *pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas*
34 *dividen dan pembayaran kembali atas modal;*

35 *(g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas*
36 *syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau*
37 *entitas syariah asosiasi; dan*

38 *(h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak*



- 1 *penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;*
2 (i) *penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan*
3 *dalam ekuitas; dan*
4 (j) *penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara*
5 *resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui*
6 *atau tidak sebagai kewajiban.*

7
8 **59.** *Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam*
9 *saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi*
10 *yang setara dengan persyaratan di atas, yang memper-*
11 *lihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis*
12 *penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang*
13 *melekat pada setiap jenis penyertaan.*

14

15

16 **LAPORAN LABA RUGI**

17

18 **Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi**

19

20 **60.** *Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan*
21 *sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja*
22 *keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.*
23 *Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:*

- 24 (a) *pendapatan usaha;*
25 (b) *bagi hasil untuk pemilik dana;*
26 (c) *beban usaha;*
27 (d) *laba atau rugi usaha;*
28 (e) *pendapatan dan beban nonusaha;*
29 (f) *laba atau rugi dari aktivitas normal;*
30 (g) *pos luar biasa;*
31 (h) *beban pajak; dan*
32 (i) *laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.*
33 *Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan*
34 *laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar*
35 *Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut*
36 *diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas*
37 *syariah secara wajar.*

38

1 61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasil-
2 kan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi.
3 Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam mema-
4 hami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan
5 diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan
6 laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan
7 penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai
8 serta perubahan urutan dari pos-pos yang terdapat dalam
9 laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
10 melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi
11 materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen
12 pendapatan dan beban.

13
14 62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan
15 tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas
16 syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional
17 yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan
18 non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan
19 penggunaan dana kebajikan.

20
21 **Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan**
22 **Atas Laporan Keuangan**

23
24 *63. Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi*
25 *atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban*
26 *dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada*
27 *sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.*

28
29 64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincian
30 seperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba
31 Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalam
32 rangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerja
33 keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensi
34 menghasilkan laba atau rugi dan prediksi.

35
36 *65. Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban*
37 *menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tam-*
38 *bahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan*

1 *dan amortisasi serta beban pegawai.*

2

3 **66. Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan**
4 **Laba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,**
5 **jumlah dividen per saham yang diumumkan.**

6

7 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

8

9 **67. Entitas syariah harus menyajikan laporan peru-**
10 **bahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan,**
11 **yang menunjukkan:**

12 (a) *laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;*

13 (b) *setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau*
14 *kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Per-*
15 *nyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui*
16 *secara langsung dalam ekuitas;*

17 (c) *pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akun-*
18 *tansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar*
19 *sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar*
20 *Akuntansi Keuangan terkait;*

21 (d) *transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada*
22 *pemilik;*

23 (e) *saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir*
24 *periode serta perubahannya; dan*

25 (f) *rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing*
26 *jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan*
27 *akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah*
28 *setiap perubahan.*

29

30 68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan
31 peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama
32 periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu
33 yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
34 Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang
35 berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran
36 modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah
37 keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas
38 syariah selama periode yang bersangkutan

1 LAPORAN ARUS KAS

2

3 69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang
4 telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
5 terkait.

6

7

**8 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
9 ZAKAT**

10

11 *70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan*
12 *Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama*
13 *laporan keuangan, yang menunjukkan:*

14 (a) *dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):*

15 (i) *zakat dari dalam entitas syariah;*

16 (ii) *zakat dari pihak luar entitas syariah;*

17 (b) *penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat*
18 *untuk:*

19 (i) *fakir;*

20 (ii) *miskin;*

21 (iii) *riqab;*

22 (iv) *orang yang terlilit hutang (gharim);*

23 (v) *muallaf;*

24 (vi) *fiisabilillah;*

25 (vii) *orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan*

26 (viii) *amil;*

27 (c) *kenaikan atau penurunan dana zakat;*

28 (d) *saldo awal dana zakat; dan*

29 (e) *saldo akhir dana zakat.*

30

31 71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluar-
32 kan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada
33 penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan
34 apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi
35 kriteria wajib zakat.

36

37 72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
38 Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu

1 jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana
2 zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

3

4 73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup
5 penyisihan kerugian aset produktif.

6

7 **74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam**
8 **catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana**
9 **Zakat, tetapi tidak terbatas pada:**

10 (a) *sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas*
11 *syariah;*

12 (b) *sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas*
13 *syariah;*

14 (c) *kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing*
15 *asnaf; dan*

16 (d) *proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing*
17 *penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait,*
18 *sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengung-*
19 *kapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan*
20 *Istimewa, dan pihak ketiga.*

21

22

23 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

24 KEBAJIKAN

25

26 **75. Entitas menyajikan Laporan Sumber dan**
27 **Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama**
28 **laporan keuangan, yang menunjukkan:**

29 (a) *sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:*

30 (i) *infak;*

31 (ii) *sedekah;*

32 (iii) *hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan per-*
33 *undang-undangan yang berlaku;*

34 (iv) *pengembalian dana kebajikan produktif;*

35 (v) *denda; dan*

36 (vi) *pendapatan nonhalal.*

37 (b) *penggunaan dana kebajikan untuk:*

38 (i) *dana kebajikan produktif;*

- 1 (ii) *sumbangan; dan*
- 2 (iii) *penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.*
- 3 (c) *kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;*
- 4 (d) *saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan*
- 5 (e) *saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.*

6
7 76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
8 kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka
9 waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan
10 dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

11
12 77. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan
13 atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,
14 tetapi tidak terbatas, pada:

- 15 (a) *sumber dana kebajikan;*
- 16 (b) *kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-*
17 *masing penerima; dan*
- 18 (c) *proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing*
19 *penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak*
20 *terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7:*
21 **Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai**
22 **Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.**

23 24 25 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

26 27 **Struktur**

28
29 78. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan
30 secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba
31 Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
32 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan
33 Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan
34 dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas
35 Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan
36 mengungkapkan:

- 37 (a) *informasi tentang dasar penyusunan laporan keuang-*
38 *an dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterap-*

- 1 *kan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;*
2 (b) *informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar*
3 *Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca,*
4 *Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan*
5 *Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan*
6 *Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana*
7 *Kebajikan;*
8 (c) *informasi tambahan yang tidak disajikan dalam*
9 *laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka*
10 *penyajian secara wajar.*

11
12 79. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
13 naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan
14 Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas,
15 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan
16 Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti
17 kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan
18 Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan
19 dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta
20 pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk
21 menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

22
23 80. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami
24 laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan
25 keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan
26 Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
27 (a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan
28 akuntansi yang diterapkan;
29 (b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai
30 urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam
31 laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan
32 keuangan;
33 (c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan
34 pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang
35 bersifat non-keuangan.

36
37 81. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan
38 Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut

1 praktis untuk dilaksanakan

2

3 **Penyajian Kebijakan Akuntansi**

4

5 *82. Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas*

6 *Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:*

7 *(a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan*
8 *keuangan;*

9 *(b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna*
10 *memahami laporan keuangan secara benar.*

11

12 83. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran
13 yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai
14 wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyusunan
15 laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran
16 digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan
17 cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan
18 kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
19 Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi
20 tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan
21 apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna
22 laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa
23 tercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansi
24 meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

25 (a) pengakuan pendapatan;

26 (b) prinsip pembagian hasil usaha (bagi pendapatan atau bagi
27 hasil);

28 (c) prinsip-prinsip konsolidasi;

29 (d) penggabungan usaha;

30 (e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau
31 amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;

32 (f) *murabahah*;

33 (g) *mudharabah*;

34 (h) *musyarakah*;

35 (i) *istishna'*;

36 (j) *ijarah*;

37 (k) *salam*;

38 (l) instrumen keuangan dan investasi;

- 1 (m) persediaan;
- 2 (n) pajak termasuk pajak tangguhan;
- 3 (o) penyesihan;
- 4 (p) imbalan kerja;
- 5 (q) penjabaran mata uang asing;
- 6 (r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya
- 7 antar segmen;
- 8 (s) definisi kas dan setara kas; dan
- 9 (t) wakaf;

10

11 **Pengungkapan Lain**

12

13 *84. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini*
14 *jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi*
15 *yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:*

- 16 (a) *domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara*
17 *tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat*
18 *entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda*
19 *dari lokasi kantor pusat;*
- 20 (b) *keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan*
21 *utama entitas syariah;*
- 22 (c) *nama entitas syariah dalam grup, nama entitas*
23 *syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan*
24 *entitas syariah holding;*
- 25 (d) *nama anggota direksi dan komisaris; dan*
- 26 (e) *jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata*
27 *jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.*

28

29 *85. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam*
30 *mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan*
31 *informasi berikut ini:*

- 32 (a) *karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan*
33 *termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/mar-*
34 *gin/ujrah dan nama pemodal;*
- 35 (b) *nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu,*
36 *tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau*
37 *pembayaran;*
- 38 (c) *dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen*



- 1 *pendanaan dapat dikonversi;*
- 2 *(d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca;*
- 3 *(e) jaminan; dan*
- 4 *(f) hal penting lainnya.*

5

6 **86. Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi**
7 **Keuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan**
8 **penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan**
9 **ketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka fakta**
10 **tersebut harus diungkapkan.**

11

12

13 **TANGGAL EFEKTIF**

14

15 **87. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini ber-**
16 **laku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan**
17 **keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai**
18 **tanggal 1 Januari 2008. Penerapan lebih dini dianjurkan.**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



1

2 **LAMPIRAN**

3

4 *Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*
5 *Standar Akuntansi Keuangan.*

6

7

8 **LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH**

9

10 **Komponen Laporan Keuangan**

11

12 1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri
13 dari:

14 (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

15 (b) Laporan Laba Rugi;

16 (c) Laporan Arus Kas;

17 (d) Laporan Perubahan Ekuitas;

18 (e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat;

19 (f) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;

20 (g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;

21 (h) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan

22 (i) Catatan atas Laporan Keuangan.

23

24 **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

25

26 2. Bank syariah menyajikan pada Laporan Posisi
27 Keuangan (Neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam
28 PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos
29 berikut:

30 **Aset**

31 (a) Kas;

32 (b) Penempatan pada Bank Indonesia;

33 (c) Giro pada bank lain,

34 (d) Penempatan pada bank lain;

35 (e) Efek-efek;

36 (f) Piutang:

37 (i) piutang *murabahah*;38 (ii) piutang *salam*;

- 1 (iii) piutang *istishna'*;
- 2 (iv) piutang pendapatan *ijarah*;
- 3 (g) Pembiayaan:
- 4 (i) pembiayaan *mudharabah*;
- 5 (ii) Pembiayaan *musyarakah*;
- 6 (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada
- 7 klien);
- 8 (i) Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
- 9 (j) Aset *istishna* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin
- 10 *istishna*);
- 11 (k) Penyertaan;
- 12 (l) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan
- 13 (m) Aset lain.
- 14
- 15 **Kewajiban**
- 16 (a) Kewajiban segera;
- 17 (b) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- 18 (c) Simpanan:
- 19 (i) giro *wadiah*;
- 20 (ii) tabungan *wadiah*;
- 21 (d) Simpanan bank lain:
- 22 (i) giro *wadiah*;
- 23 (ii) tabungan *wadiah*;
- 24 (e) Kewajiban lain:
- 25 (i) hutang *salam*;
- 26 (ii) hutang *istishna*;
- 27 (f) Kewajiban kepada bank lain;
- 28 (g) Pembiayaan yang diterima;
- 29 (h) Hutang pajak;
- 30 (i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;
- 31 (j) Pinjaman yang diterima;
- 32 (k) Hutang lainnya; dan
- 33 (l) Pinjaman subordinasi.
- 34
- 35 **Dana Syirkah Temporer**
- 36 (a) *Syirkah* temporer dari bukan bank:
- 37 (i) tabungan *mudharabah*;
- 38

- 1 (ii) deposito *mudharabah*;
- 2 (b) *Syirkah* temporer dari bank:
- 3 (i) tabungan *mudharabah*;
- 4 (ii) deposito *mudharabah*.
- 5 (c) *Musyarakah*;
- 6
- 7 ***Ekuitas***
- 8 (a) Modal disetor;
- 9 (b) Tambahan modal disetor; dan
- 10 (c) Saldo laba (rugi).
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38

1 **Ilustrasi 1**

2

3

PT Bank Syariah "X"

4

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

5

Per 31 Desember 20X1

6

7 **Aset**

8

Kas XXX

9

Penempatan pada Bank Indonesia XXX

10

Giro pada bank lain XXX

11

Penempatan pada bank lain XXX

12

Investasi pada efek/surat berharga XXX

13

Piutang:

14

Murabahah XXX

15

Salam XXX

16

Istishna' XXX

17

Pembiayaan:

18

Mudharabah XXX

19

Musyarakah XXX

20

Pinjaman qardh

21

Penyisihan kerugian penghapusbukuan

22

aset produktif XXX

23

Persediaan XXX

24

Tagihan dan kewajiban akseptasi XXX

25

Aset ijarah XXX

26

Aset istishna dalam penyelesaian XXX

27

Penyertaan pada entitas lain XXX

28

Aset tetap dan akumulasi penyusutan XXX

29

Piutang:

30

Pendapatan bagi hasil XXX

31

Pendapatan ijarah XXX

32

Aset lainnya XXX

33

Jumlah Aset XXX

34

35

36

37

38

1	Kewajiban	
2	Kewajiban segera	XXX
3	Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX
4	Simpanan	XXX
5	Simpanan dari bank lain	XXX
6	Hutang:	
7	Salam	XXX
8	Istishna'	XXX
9	Kewajiban kepada bank lain	XXX
10	Pembiayaan yang diterima	XXX
11	Hutang pajak	XXX
12	Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	XXX
13	Pinjaman yang diterima	XXX
14	Pinjaman subordinasi	XXX
15	Jumlah Kewajiban	XXX
16		
17	Dana Syirkah temporer	
18	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
19	Tabungan mudharabah	XXX
20	Deposito mudharabah	XXX
21	Dana syirkah temporer dari bank:	
22	Tabungan mudharabah	XXX
23	Deposito mudharabah	XXX
24	Musyarakah	XXX
25	Jumlah Dana Syirkah Temporer	XXX
26		
27	Ekuitas	
28	Modal disetor	XXX
29	Tambahan modal disetor	XXX
30	Saldo laba (rugi)	XXX
31	Jumlah Ekuitas	XXX
32		
33	Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer	
34	dan Ekuitas	XXX
35		
36		
37		
38		

1 Laporan Laba Rugi

2

3 3. Komponen-komponen Laporan Laba Rugi bank syariah
4 disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos
5 umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK
6 terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang
7 mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

8 (a) Pendapatan usaha:

9 (i) Pendapatan dari jual beli:

- 10 1. pendapatan marjin *murabahah*;
- 11 2. pendapatan bersih *salam* paralel;
- 12 3. pendapatan bersih *istishna* paralel;

13 (ii) Pendapatan dari sewa:

- 14 1. pendapatan bersih *ijarah*;

15 (iii) Pendapatan dari bagi hasil:

- 16 1. pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
- 17 2. pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

18 (iv) Pendapatan usaha lainnya;

19 (b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah*
20 temporer;

21 (c) Pendapatan usaha lainnya;

22 (i) Pendapatan imbalan (*fee*) jasa perbankan;

23 (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.

24 (d) Beban usaha;

25 (e) Laba atau rugi usaha;

26 (f) Pendapatan nonusaha;

27 (g) Beban non-usaha;

28 (h) Laba atau rugi dari aktivitas normal;

29 (i) Pos luar biasa;

30 (j) Beban pajak; dan

31 (k) Laba atau rugi bersih.

32

33

34

35

36

37

38

1 **Ilustrasi 2**

2 **PT Bank Syariah "X"**
 3 **Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba**
 4 **Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

5
6 **Pendapatan Usaha Utama**

7 Pendapatan dari jual beli:

8 Pendapatan marjin murabahah XXX

9 Pendapatan bersih salam paralel XXX

10 Pendapatan bersih istishna paralel XXX

11 Pendapatan dari sewa:

12 Pendapatan bersih ijarah XXX

13 Pendapatan dari bagi hasil:

14 Pendapatan bagi hasil mudharabah XXX

15 Pendapatan bagi hasil musyarakah XXX

16 Pendapatan usaha utama lainnya XXX

17 Jumlah Pendapatan Usaha Utama XXX

18

19 Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil (xxx)

20

21 **Pendapatan Usaha Lainnya**

22 Pendapatan imbalan jasa perbankan XXX

23 Pendapatan imbalan investasi terikat XXX

24 Jumlah Pendapatan Usaha Utama XXX

25

26 **Beban Usaha**

27 Beban kepegawaian (xxx)

28 Beban administrasi (xxx)

29 Beban penyusutan dan amortisasi (xxx)

30 Beban usaha lain (xxx)

31 Jumlah Beban Usaha (xxx)

32

33 Laba (Rugi) Usaha XXX

34

35 **Pendapatan dan Beban Nonusaha**

36 Pendapatan nonusaha XXX

37 Beban nonusaha XXX

38 Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha XXX

1	Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal	XXX
2		
3	Pos Luar Biasa	XXX
4		
5	Laba (Rugi) sebelum Pajak	XXX
6		
7	Beban Pajak	(XXX)
8		
9	Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	XXX
10		
11	Saldo Laba	
12	Saldo laba awal periode	XXX
13	Jumlah saldo laba	XXX
14	Dividen yang dibayar	<u>(XXX)</u>
15	Saldo laba akhir periode	XXX
16	Dirinci atas:	
17	Cadangan tujuan	XXX
18	Cadangan umum	XXX
19	Saldo laba yang belum dicadangkan	XXX
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

1 Laporan Arus Kas

2

3 4. Bank syariah menyajikan laporan arus kas dengan
4 mengacu ke PSAK terkait.

5

6 Laporan Perubahan Ekuitas

7

8 5. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas
9 dengan mengacu ke PSAK terkait.

10

11 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

12

13 6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
14 memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana
15 dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

16

17 7. Bank syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana
18 Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan,
19 yang menunjukkan:

20 (a) saldo awal dana investasi terikat;

21 (b) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai
22 per unit pada awal periode;

23 (c) dana investasi yang diterima dan unit investasi yang
24 diterbitkan bank syariah selama periode laporan;

25 (d) penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama
26 periode laporan;

27 (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

28 (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;

29 (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang
30 dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;

31 (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan

32 (i) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai
33 per unit pada akhir periode.

34

35 8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari
36 pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh
37 bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan
38 merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak

1 mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan
2 investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban
3 mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

4

5 9. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan
6 sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen
7 investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat
8 adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan
9 permintaan pemilik dana.

10

11 10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah
12 jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat,
13 selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan
14 yang berasal dari penarikan.

15

16 11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen inves-
17 tasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang
18 disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

19

20 12. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi
21 Terikat harus mengungkapkan:

22 (a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana
23 investasi terikat;

24 (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana
25 investasi terikat atau unit investasi.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 **Ilustrasi 3**

2

3

PT Bank Syariah "X"4 **Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat**5 **Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

6

7 Saldo awal	XXX
8 Jumlah unit investasi awal periode	XXX
9 Nilai per unit investasi	XXX
10 Penerimaan dana	XXX
11 Penarikan dana	(XXX)
12 Keuntungan (kerugian) investasi	XXX
13 Biaya administrasi	(XXX)
14 Imbalan bank sebagai agen investasi	XXX
15 Saldo investasi pada akhir periode	XXX
16 Jumlah unit investasi pada akhir periode	XXX
17 Nilai unit investasi pada akhir periode	XXX

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

2

3 13. Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi
4 Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi
5 pendapatan bank syariah, yang menggunakan dasar akrual (*ac-*
6 *crual basis*), dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada
7 pemilik, dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

8

9 14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan
10 bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan
11 Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan
12 keuangannya.

13

14 15. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi
15 Hasil, bank syariah menyajikan:

16 (a) Pendapatan usaha utama;

17 (b) Penyesuaian atas:

18 (i) pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas
19 atau setara kasnya belum diterima;

20 (ii) pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang
21 kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;

22 (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

23 (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk
24 bagi hasil;

25 (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk
26 bagi hasil:

27 (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;

28 (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 **Ilustrasi 4**

2

3

PT Bank Syariah "X"4 **Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil**5 **Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

6

7 Pendapatan Usaha Utama (Akrual) xxx

8

9 **Pengurang:**

10 Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara

11 kasnya belum diterima:

12 Pendapatan margin murabahah (xxx)

13 Pendapatan istishna' (xxx)

14 Hak bagi hasil:

15 Pembiayaan mudharabah (xxx)

16 Pembiayaan musyarakah (xxx)

17 Pendapatan sewa (xxx)

18 Jumlah (xxx)

19

20 **Penambah:**

21 Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya

22 diterima pada periode berjalan:

23 Penerimaan pelunasan piutang:

24 Margin murabahah xxx

25 Istishna' xxx

26 Pendapatan sewa xxx

27 Penerimaan piutang bagi hasil:

28 Pembiayaan mudharabah xxx

29 Pembiayaan musyarakah xxx

30 Jumlah xxx

31 Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil xxx

32 Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah xxx

33 Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana xxx

34 Dirinci atas:

35 Hak pemilik dana atas bagi hasil

36 yang sudah didistribusikan xxx

37 Hak pemilik dana atas bagi hasil

38 yang belum didistribusikan xxx

1 **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat**

2

3 16. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan Peng-
4 gunaan Dana Zakat sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait.

5

6 **Ilustrasi 5**

7

8 **PT Bank Syariah "X"**9 **Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat**10 **Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

11

12 **Sumber Dana Zakat**

13 Zakat dari dalam bank syariah	xxx
14 Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
15 Jumlah	xxx

16

17 **Penggunaan Dana Zakat**

18 Fakir	(xxx)
19 Miskin	(xxx)
20 Amil	(xxx)
21 Muallaf	(xxx)
22 Orang yang terlilit hutang (gharim)	(xxx)
23 Riqab	(xxx)
24 Fisabilillah	(xxx)
25 Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	(xxx)
26 Jumlah Penggunaan Dana Zakat	(xxx)

27

28 Kenaikan (penurunan) dana zakat xxx

29 Saldo awal dana zakat xxx

30 Saldo akhir dana zakat xxx

31

32

33

34

35

36

37

38

1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

2

3 17. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan
4 Penggunaan Dana Kebajikan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK
5 terkait.

6

7 Ilustrasi 6

8

9 PT Bank Syariah "X"**10 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan****11 Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

12

13 Sumber Dana Kebajikan

14	Infak Zakat dari dalam bank syariah	xxx
15	Sedekah	xxx
16	Hasil pengelolaan wakaf	xxx
17	Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
18	Denda	xxx
19	Pendapatan nonhalal	xxx
20	Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx

21

22 Penggunaan Dana Kebajikan

23	Dana kebajikan produktif	(xxx)
24	Sumbangan	(xxx)
25	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
26	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)

27

28 Kenaikan (penurunan) dana kebajikan xxx

29 Saldo awal dana kebajikan xxx

30 Saldo akhir dana kebajikan xxx

31

32 Catatan atas Laporan Keuangan

33

34 18. Bank syariah menyajikan catatan atas Laporan
35 Keuangan sesuai PSAK No. 101 dan PSAK terkait.

36

37

38



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 101

November 2006

EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED No.
101**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH**

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-07
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 07
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	08 - 09
Tanggungjawab atas Laporan Keuangan	10
Komponen Laporan Keuangan	11 - 15
PERTIMBANGAN MENYELURUH	16 - 37
Penyajian Secara Wajar	16 - 19
Kebijakan Akuntansi	20 - 22
Kelangsungan Usaha	23 - 24
Dasar AkruaI	25
Konsistensi Penyajian	26 - 27
Materialitas dan Agregasi	28 - 29
Saling Hapus (<i>offsetting</i>)	30 - 32
Informasi Komparatif	33 - 37
STRUKTUR DAN ISI	38 - 43
Identifikasi Laporan Keuangan	38 - 41
Periode Pelaporan	42 - 43
NERACA	44 - 59
Aset Lancar	47 - 48
Kewajiban Jangka Pendek	49 - 51
Informasi yang Disajikan dalam Neraca	52 - 59
LAPORAN LABA RUGI	60 - 66
Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi	60 - 62
Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan	63 - 66

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	67 – 68
LAPORAN ARUS KAS	69
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT	70 – 74
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	75 – 77
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	78 – 86
Struktur	78 – 81
Penyajian Kebijakan Akuntansi	82 – 83
Pengungkapan Lain	84 – 86
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF	87
Lampiran	
Laporan Keuangan Bank Syariah	